

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Broker Illegal Marak Bappebti Bertindak



Foto : Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya didampingi Sekertaris Bappebti, Nizarli dan Kadis Perindag Pemprov Bali, Ni Wayan Kusumawathi membuka penyegaran dan penataan WPB. Kuta, Bali, 27-28 Februari 2013.

Tak ada kata menyerah, likuiditas kontrak berjangka multilateral harus terus diupayakan sehingga fungsi bursa berjangka sebagai rujukan harga komoditi primer dan lindung nilai dapat tercapai. Seperti pada laporan Buletin Kontrak Berjangka Edisi Januari, lalu, Bappebti telah mematok pelaku industri agar kontrak berjangka multilateral minimal dicapai sebesar 30 % di tahun 2013.

'Nah, untuk mencapai angka patokan tersebut tentu perlu ada strategi dan sasaran antara. Sehingga angka patokan itu tidak sekedar kewajiban, melainkan manfaatnya terasa hingga ke petani produsen.

Dalam upaya Bappebti mengenggot para pelaku untuk kontrak multilatera, pada 28 Februari 2013, lalu, digelar sebuah pertemuan khusus di Kuta, Bali. Orang nomor dua Kementerian Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, berhadapan langsung dengan pelaku pasar yang diwakili direksi dari 10 perusahaan pialang berjangka, direksi dari dua bursa berjangka, direksi dua lembaga kliring serta pengurus dari dua asosiasi industri perdagangan berjangka komoditi.

Pertemuan spesial itu juga dihadiri dua mantan Kepala Bappebti, yakni Ardiansyah Parman dan Deddy Saleh. Dan tentunya sebagai 'tuan rumah', Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dan jajaran Eselon II hadir mendampingi.

Inti pertemuan penting itu, seperti diutarakan Wamendag Bayu Krisnamurthi, tidak sekedar meningkatkan likuiditas bursa berjangka untuk kontrak multilateral hingga 30 %. Melainkan, bursa berjangka berperan sebagai instrumen ekonomi modern. Seperti, harga kontrak berjangka komoditi yang tercipta di bursa dapat dijadikan indikator pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Apa yang dipaparkan Wamendag itu

bukannya tanpa alasan kuat. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa, merupakan pasar potensial. "Sejalanannya, potensi pasar domestik saja yang kita kerjakan sudah memberi nilai lebih bagi perekonomian nasional. Pihak asing saja menganggap Indonesia sebagai pasar potensial, mengapa kita tidak?"

"Jadi, target yang ditetapkan Bappebti sebesar 30 % total volume kontrak berjangka multilateral itu hanya sasaran antara. Tetapi, visi kita jauh ke depan. Yakni, bagaimana Indonesia yang kaya dengan berbagai komoditi dunia menjadi pasar dan menentukan harga," terang Wamendag.

Pertemuan singkat sekitar dua jam itu, pada intinya sudah merekam gambaran industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Setidaknya hal itu tampak dari sebanyak tujuh poin catatan Wamendag Bayu Krisnamurthi.

Di bagian lain laporan Redaksi pada edisi ini yakni, gambaran praktik perdagangan ilegal baik yang dilakukan pelaku asing maupun yang datang dari dalam negeri. Bappebti telah melakukan berbagai upaya meredam aktivitas perdagangan ilegal tersebut. Namun, denyut praktik ilegal itu diakui Bappebti masih kencang terasa yang disebabkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang investasi perdagangan berjangka. Dan, para pelaku ilegal itu memanfaatkan celah-celah teknologi informasi.

Selain itu, redaksi juga menurunkan berbagai laporan menarik yang tidak kalah penting untuk diikuti. Seperti, laporan tentang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi.

Akhirnya, Redaksi mengucapkan selamat membaca.

Salam!



KONTRAK
BERJANGKA
MENUNDAI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus Muharni S., Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyantri, Erni Artati, Sri Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke

E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- Broker Ilegal Marak Bappebti Merangsak
- Pialang Legal Melanggar Pasti Diganjar
- Semangat Revitalisasi Agar PLKA Tak Mati Suri

Pasar Lelang.....11-12

- 2014 Bali Selenggarakan PLKA Online

Resi Gudang.....13

- Semester II 2013 Wonogiri Targetkan Gudang SRG Beroperasi

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Gudang PT Pos Indonesia Tidak Ekonomis Untuk SRG
- LPRG Mandek di Kemenkeu
- Kemendag Tetapkan Komoditi Garam Subjek SRG
- 2013 Valbury Targetkan Pertumbuhan 40 %

Analisa.....19

Breaknews.....20

Info SRG.....20-21

Kolom.....24-25

- Mengetahui Lebih Dalam Analisis Fundamental

Berjangka...8-10

Meretas Kontrak
Multilateral 30 %



Wawasan...22-23

Persiapan Pelaksanaan
Sistem Resi Gudang



Kiprah...26-27

Antusias dan Berambisi
Angkat GAF





Broker Ilegal Marak Bappebti Bertindak

Industri PBK tanah air diramaikan dengan maraknya aktivitas broker abal-abal alias ilegal tanpa izin. Sebagai regulator, Bappebti tentu saja tidak diam. Dengan berbagai strategi Bappebti menindak para broker ilegal itu, tapi perlu dukungan dan kerjasama semua pihak.

Memberantas pialang atau broker ilegal bukanlah perkara mudah. Hal inilah yang masih dialami regulator perdagangan berjangka komoditi (PBK) yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada hal, dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK, sudah tegas perbedaan antara pialang legal dan pialang ilegal yang memanfaatkan kegiatan bisnis di bidang PBK. Terutama, dari aspek perizinan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan PBK namun tidak memiliki izin dari Bappebti.

Bahkan, di dalam UU No. 32/1997 bentuk sanksi yang dilakukan terhadap pelanggar tidak ada batasan minimal. "Namun, untuk pengenaan sanksi bagi pelanggar pada UU No.10/2011 pengenaannya cukup berat, yaitu sanksi minimal dan maksimal baik denda maupun pidana kurungan," kata Kepala Bappebti, Sahrul R. Sampurna Jaya. di kantor Bappebti, Jakarta, akhir Februari lalu.

Lantas, faktor apakah yang mendorong maraknya pialang ilegal?

Tak lain, karena industri PBK sudah tumbuh dan berkembang. Apalagi setelah disahkan UU No. 11 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK, dimana kesempatan untuk melaksanakan investasi di

bidang perdagangan berjangka komoditi peluangnya semakin luas.

Cakupan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang ditransaksikan dalam perdagangan berjangka tidak hanya produk-produk pertanian dan pertambangan turunannya yang bersifat fisik semata (*tangible*). Akan tetapi, produk-produk derivatif yang bersifat non fisik seperti indeks, mata uang (*forex*) dan sebagainya.

"Nah, untuk mengeruk keuntungan, maka maraklah pialang-pialang ilegal yang kegiatannya merugikan masyarakat. Untuk itu, masyarakat jangan tergiur dengan janji manis pialang ilegal, karena setelah mereka mendapatkan banyak nasabah, mereka akan melarikan diri dan



tidak bertanggungjawab,” tegas Syahrul.

2 Jenis Pialang Ilegal

Untuk lebih jauh mengenal pialang ilegal, Syahrul R. Sempurnajaya menjelaskan, ada dua kategori pialang ilegal yang saat ini marak menawarkan produk-produk investasi. Yakni, pertama, perusahaan ilegal lokal. Perusahaan ini, seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan di wilayah Indonesia. Pialang lokal tersebut bersifat mixed dan tidak terstruktur, di mana setiap transaksi jumlah lot-nya sangat bervariasi dari lot dengan dengan nilai margin minimum hingga margin bernilai miliaran rupiah.

“Dari segi kegiatan pialang ilegal lokal tersebut sangat beragam dan tidak fokus pada transaksi financial saja seperti forex dan indeks atau loco London. Akan tetapi, bertindak juga sebagai perusahaan manajemen investasi dengan modus mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian diinvestasikan diluar kegiatan industri perdagangan berjangka seperti, pertambangan, perumahan, perkayuan dan sebagainya,” ungkap Syahrul.

Jenis kedua, perusahaan ilegal asing. Perusahaan ini dalam pengendalian operasionalnya dilakukan dari

luar negeri, namun praktiknya dilakukan di wilayah Indonesia. Bentuk kegiatannya pun dilakukan secara rapi, utuh dan semua kegiatannya dilakukan secara elektronik (online) baik yang menyangkut pembukaan rekening nasabah, pengisian dan penandatanganan dokumen perjanjian amanat (bila ada) dan lot transaksinya relatif kecil.

“Karena semua aktivitas dilakukan dengan media online, perusahaan asing ini membidik segmen pasar menengah atas, atau segmen masyarakat yang sudah dapat mengakses media online,” katanya.

Pada umumnya, lanjut Syahrul, pialang ilegal asing tidak memiliki kantor resmi hanya menyewa kantor kecil sebagai pusat pelatihan calon nasabah (Introducer broker). Sasaran perusahaan adalah negara-negara asia bagian timur seperti China, Malaysia, Vietnam dan Indonesia, Afrika dan Amerika Latin.

“Pialang ilegal asing biasanya tampil sebagai agen penjual atau penyelenggara seminar untuk kegiatan investasi dengan cara freelance, tetapi mereka sangat efektif memasarkan kontrak melalui internet seperti: website, email, twitter, facebook, google dan yahoo dan lainnya,” papar Syahrul.

Namun, menurut Syahrul, secara le-

gal formal, introducing broker asing ini sangat sulit ditangkap karena sulitnya membuktikan kegiatan ilegal mereka, kecuali adanya pengaduan dari nasabah ataupun masyarakat.

Secara umum, Syahrul mengungkapkan, banyak broker ilegal yang berlisensi sebagai layanan pendidikan di bidang forex, misalnya online trading akademi, toko buku forex dan lainnya. “Ini modus-modus para pemain,” ujarnya.

Kerjasama Sektoral

Bappebti sebagai regulator industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air, akan terus meningkatkan dalam mengawasi pelaku pasar terutama pialang-pialang ilegal secara komprehensif. “Baik itu pengawasan yang bersifat pengawasan secara online yang dilaksanakan setiap hari di Bappebti, bursa berjangka dan lembaga kliring maupun audit ke perusahaan yang dilaksanakan secara rutin maupun sewaktu-waktu,” kata Syahrul.

Sementara itu, tambah Syahrul, untuk penanganan kasus-kasus terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, Bappebti sudah melakukan tindakan dalam bentuk pemeriksaan dan penyidikan. “Termasuk penanganan pialang-pialang ilegal baik asing maupun dalam negeri yang menawarkan produk investasi secara ilegal melalui kerjasama Tim Waspada Investasi yang beranggotakan Bappebti dan Ditjen PDN Kemendag, BAPEPAM-LK (Sekarang adalah OJK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, PPATK, dan Kementerian Koperasi dan UKM.”

“Sedangkan untuk penanganan perusahaan asing dan lokal yang menawarkan investasi PBK secara ilegal melalui situs-situs ilegal, maka Bappebti telah meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Ditjen Aplikasi dan Telematika. Melalui surat No. 18/BAPPEBTI/SD/1/2012 tertanggal 19 Januari 2012, lalu, kami sudah meminta Kemenkominfo agar menutup seluruh situs-situs ilegal tersebut untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya. ▲

Langkah Preventif Bappebti Mencegah Aksi Pialang Ilegal, di antaranya:

- 1) Sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, serta kalangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
- 2) Kerjasama dengan Tim Investigasi Waspada Investasi yang anggotanya Bappebti dan Ditjen PDN Kemendag, BAPEPAM-LK (Sekarang adalah OJK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, PPATK, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- 3) Kemenkoinfo (Kementertian Komunikasi dan Informatika) dalam hal memblokir beberapa website dari perusahaan ilegal dan PPATK dalam rangka pencegahan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 4) PPATK dalam rangka mencegah terjadinya pemasukan uang haram dari hasil korupsi uang Negara atau kejahatan lainnya dalam rangka pencucian uang ke dalam industri PBK.
- 5) Dalam rangka pembinaan kepada pelaku pasar kerjasama juga dilakukan dengan stakeholder seperti Bursa, Lembaga Kliring dan Asosiasi Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka yang mewajibkan setiap Anggota Pialang Berjangka harus mendapatkan izin dari Bappebti apabila akan menyelenggarakan seminar, workshop, sosialisasi dengan mengundang pejabat Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya

Pialang Legal Melanggar Pasti Diganjar

Menyinggung masalah pialang-pialang legal yang juga melakukan pelanggaran peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, menegaskan, setiap pihak yang melakukan pelanggaran pastinya akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

“Untuk pialang legal yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PBK, Bappebti tentunya akan meneliti dan memeriksa terlebih dahulu sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pialang resmi tersebut,” katanya.

Apabila pialang resmi tersebut melakukan pelanggaran ringan, kata Syahrul, biasanya dilakukan teguran secara tertulis, namun apabila melakukan pelanggaran berat, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif bisa itu berupa denda atau ganti rugi hingga penutupan operasional.

“Selanjutnya apabila ternyata dalam pemeriksaan diketahui adanya unsur pidana yang dilakukan oleh pialang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan

dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32/1997 tentang PBK,” kata Syahrul.

Pesan Bappebti

Dalam rangka mencegah iming-iming yang dilakukan pialang terhadap calon nasabah atau investor dalam merekrut calon nasabahnya, Syahrul mengatakan, “Kami dari Bappebti selalu menekankan kepada para pialang dan wakil pialangnya agar dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang PBK harus benar-benar memperhatikan aspek *Know Your Customer* (KYC) atau *Know Your Employee* (KYE).”

Apa maksud aspek KYC atau KYE? Syahrul menjelaskan, setiap wakil pialang harus menjelaskan secara benar mengenai transaksi PBK kepada calon nasabahnya sebelum yang bersangkutan menyetorkan dananya untuk investasi di bidang PBK.

“Calon nasabah juga harus membaca seluruh isi perjanjian dan isi dokumen mengenai adanya resiko dalam perdagangan berjangka sebelum menandatangani perjanjian tersebut,” kata Syahrul.

“Selain itu, calon nasabah juga harus

mengerti mekanisme transaksi PBK melalui simulasi yang dilakukan di perusahaan pialang berjangka bersangkutan.”

“Demikian juga pialang harus memahami seluruh pegawai yang ada di dalam perusahaan pialang tersebut sebelum yang bersangkutan direkrut sebagai Wakil Pialang Berjangka, tenaga marketing atau pegawai lainnya baik pengetahuannya tentang PBK maupun perilakunya,” papar Syahrul R Sempurnajaya. ▲

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Daftar Broker Ilegal Dalam Negeri

per 31 Januari 2013

1. **CV. Smart Investa Mandiri**, beralamat di Komplek Ruko Palembang Square Blok. R 75, Jl. Angkatan 45 Palembang.
2. **PT. Vika Lia Investsteer/Lazy Way Of Forex Trading**, beralamat di Jakarta.
3. **PT. Wong Limo Futures**, beralamat di Ruko Surapati Core No. AB 32 Jl. Surapati, Bandung.
4. **PT. Easton Consultants Private Centre**, beralamat di The Plaza Office Tower Lt 22 suite E/F-1 Jl. MH. Thamrin kav. 28 – 30, Jakarta Pusat.
5. **PT. CSM Bintang Indonesia**, beralamat di Gedung STC Senayan Lantai 4 No. 71 Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat.
6. **PT FBS Indonesia**, beralamat di Jl. Matraman 16A, belakang hotel "Horizon", Bandung.
7. **Forex Amanah.com**, beralamat di Jl. Brigjen Katamso Rt.001/Rw.008, Medan, Sumatera Utara.
8. **PT Bestari Lingkar Raksa Smart**, beralamat di Makassar.
9. **PT Bestari Lingkar Raksa**, beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 317 Denpasar.
10. **PT Bestari Lingkar Raksa**, beralamat di Ruko ElphaShindo Jl. Raya Mastrip Kav 3 (depan FKG UNEJ),

Jember, Jatim.

11. **PT Gliter Fx Learning Center**, beralamat di Graha BUMIPUTERA Lt. 7 Suite 701A Jl. Asia Afrika No. 141-149 Bandung.
12. **PT MYSMARTFX**, beralamat di Jl. Ciumbuleiut 122, Bandung, Jawa Barat.
13. **CV Arta Talenta Investama**, beralamat di Jl. Puspowarno II No. 2 Panularean, Laweyan, Solo.
14. **PT ProFx Sukses Mandiri**, beralamat di Ruko Satelit Town Square F11 Jl. Raya Sukomanunggal, Surabaya.
15. **PT. RGCX Indonesia/Forex 4 You** beralamat di Jl. Mujahidin No. Lambaro Skep 23121 Banda Aceh.
16. **PT. VIRGI GOLD MINING CORP**, beralamat di Bandung.
17. **BALIFX**, beralamat di Jl. Bypass Nugrah Rai (selatan Bandara), Denpasar.
18. **PT. WONG LIMO**, beralamat di Hotel Pangeran Beach, Jl. H. Ir Juanda, Padang
19. **PT Fattriyal Member**, beralamat di Palembang dan Cilacap.
20. **PT. Java Online Group**, beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 176 C Semarang, Jl. Taman Majapahit Blok EA No. 2C, Semarang.

Daftar Broker Ilegal Asing

per 31 Januari 2013

1. **Nordfx**, beralamat di Jl. Asia 115-A Medan
2. **Alpari**, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta dan Graha SA Office Building Lt. 8 Rm No. 808 Jl. Raya Gubeng No. 19-12 Surabaya.
3. **Insta Forex**, beralamat di Jl. Jati Raya G.17 Banyumanik, Semarang
4. **FXOpen**, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 50, Suite 5060 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta.
5. **MasterForex**, beralamat di Jl. Melati No. 41 Punge Jurong Banda Aceh dan di Komplek Ruko Asia Plasa No. A14 Jl. KH.Z. Mustofa Tasikmalaya, serta di Komplek Ruko Paskal Hyper Square Blok B-18 Jl. Pasir Kaliki 25-

- 27 Bandung. Selain itu, perusahaan ini juga membuka kantornya di Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Bukit Tinggi – Sumatera Barat dan di Mandiri Building Lt. 6 No. 606 Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan.
6. **Exness**, alamat websitenya di <http://exnessindo.com> dan <http://exness.4xid.com>.
 7. **RoboForex**, beralamat di Jl. Glagahsari Umbul Harjo IV, No. 83 Yogyakarta.
 8. **Fxoptimal**, alamat websitenya di <https://www.penukar.com>.
 9. **Forex4you**, beralamat di Jl. Mujahidin No. 1, Lambaro Skep, Banda Aceh – Nanggroe Aceh Darussalam.



Wamendag, Bayu Krisnamurthi

Meretas Kontrak Multilateral 30 %

Industri perdagangan berjangka komoditi tanah air saatnya unjuk gigi dan berkontribusi signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan peningkatan kontrak berjangka multilateral sebesar 30 %.

Hotel Inna, Kuta Bali, di akhir Februari 2013, lalu, menjadi saksi bisu pertemuan penting yang diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku regulator industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Bagaimana tidak penting, peserta pada pertemuan itu selain dihadiri Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, ada dua mantan Kepala Bappebti yakni Ardiansyah Parman dan Deddy Saleh. Serta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov. Bali, Ni Wayan Kusumawathi.

Dan tentunya sebagai tuan rumah, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, beserta jajaran Eselon II, Bappebti, merapatkan barisan pada pertemuan itu. Di sisi lain, untuk mendapatkan infor-

masi yang lebih akurat dari pelaku pasar, Bappebti juga mengundang direksi dari dua bursa berjangka, direksi dua lembaga kliring dan ditambah lagi direksi dari 10 perusahaan pialang berjangka, serta pengurus dari dua asosiasi industri perdagangan berjangka komoditi.

Wamendag Bayu Krisnamurthi, di kesempatan yang langka itu, langsung memimpin sidang dan meminta masuk dari berbagai pihak yang hadir. Sedangkan Kepala Bappebti, Sayhrul R. Sempurnajaya, bertindak sebagai moderator.

Dalam pengantarnya, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air sudah saatnya unjuk gigi dan berkontribusi signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Semestinya, bursa berjangka se-

bagai sarana pembentukan harga komoditi, sudah menjadi rujukan dari berbagai komoditi andalan ekspor Indonesia. Namun hingga saat ini peran bursa berjangka belum tampak signifikan,” jelas Bayu.

Lebih jauh dikatakannya, saat kita menentukan besaran bea keluar atau pajak ekspor dari berbagai komoditi ekspor masih mengacu harga dari luar negeri. “Inikan lucu, komoditinya ada di Indonesia tetapi harganya ditentukan di luar negeri. Kemudian saat menentukan bea keluar kita memakai harga yang ada di luar negeri itu.”

“Sebab itu, dalam kaitan penguatan ekonomi di dalam negeri dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk melindungi pasar do-

mestik. Seperti, mendorong berkembangnya industri hilir di dalam negeri dan menetapkan bea keluar yang lebih tinggi,” katanya.

Hasilnya sudah kita rasakan, tambah Bayu. Sebagai contoh, semula kita eksportir terbesar biji kakao. Tetapi sekarang, kita eksportir produk olahan kakao yang salah satu terbesar di dunia. “Tahun depan pun kita akan memasuki masa hilirisasi produk-produk pertambangan. Nah, tentunya semua itu potensi bagi bursa berjangka untuk menciptakan referensi harga di dalam negeri.”

Kemudian ditegaskan Bayu Krisnamurthi, Kementerian Perdagangan sangat berkepentingan untuk menjaga sektor perdagangan di dalam negeri dengan stabilisasi harga sesuai mekanisme pasar. “Oleh sebab itu, dikesempatan ini kami perlu mengetahui secara langsung dan tegas dari para pelaku pasar, apa saja upaya yang bisa diambil baik pemerintah maupun bursa berjangka untuk mengerjakan kontrak berjangka multilateral? Hal ini perlu kami ketahui sehingga Bappebti bisa fokus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,” ujar Bayu.

Bappebti sebagai salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan, tambah Bayu, telah menetapkan target pencapaian terhadap industri perdagangan berjangka komoditi untuk kontrak multilateral sebesar 30 % dari yang ada saat ini. “Semua juga begitu. Bappebti diberi target oleh Menteri Perdagangan, dan Menteri Perdagangan pun diberi target oleh Presiden.”

Peran BUMN

Setelah Wamendag membuka ruang diskusi, maka munculah tanggapan dari para pelaku pasar. Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Rakatantra, mengatakan, salah satu upaya efektif mengerjakan kontrak berjangka multilateral dalam waktu singkat adalah masuknya perusahaan-perusahaan BUMN berbasis komoditi ke bursa berjangka.

“Indikator aktifnya kontrak berjangka multilateral, ditunjukkan dengan adanya aktivitas spekulator di bursa berjangka. Nah, yang mampu menjadi spekulator yakni perusahaan-perusahaan BUMN berbasis komoditi,” jelas I Gede Rakatantra.

Senada dengan itu, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Su-



darto, mengatakan, untuk mengarahkan perusahaan BMUN masuk ke bursa berjangka perlu ada tekanan lintas sektoral.

“Karena KBI juga merupakan perusahaan BUMN, maka dalam setiap pertemuan kami juga menghimbau rekan-rekan BUMN untuk masuk ke bursa. Namun, hingga saat ini himbauan kami itu belum berhasil.” Kata Tris Sudarto.

Di sisi lain Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo, menambahkan, pada dasarnya perusahaan-perusahaan BUMN berbasis komoditi bisa melakukan aktivitas transaksi di bursa berjangka. “Tahun 2008 lalu, JFX sudah merintis kerjasama dengan sejumlah PTP Nusantara untuk transaksi kontrak fisik olein. Bahkan, JFX sudah menyiapkan sistem pasar fisik online kontrak komoditi olein.”

“Kerjasama itu merupakan prakarsa mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil. Namun, kerjasama itu tidak berlanjut disebabkan PTP Nusantara belum siap untuk memasuki pasar fisik komoditi yang dicirikan dengan transparansi dan fair trade,” papar Bihar.

Kontrak SRG

Dibagikan lain dari diskusi itu, muncul pemikiran untuk mengerjakan kontrak berjangka multilateral adalah memperdagangkan komoditi yang ada di gudang dalam skema sistem resi gudang (SRG).

Wacana itu datang dari Dirut PT. Soegee Futures, Alexander Gee. Dikatakannya, komoditi yang ada di gudang SRG sudah terstandarisasi SNI dan pembeli bisa melihat langsung fisik komoditinya.

“Salah satu kegagalan bursa terhadap kontrak berjangka multilateral di masa lampau adalah, tidak adanya standarisasi komoditi. Kemudian, tidak ada jaminan serah fisik komoditi,” kata Alex.

Tetapi dengan program pemerintah melalui Bappebti yang mengembangkan mekanisme SRG di sejumlah daerah, tambah Alex, kegagalan di masa lampau itu bisa diatasi.

“Mekanisme pasar fisik komoditi yang diselenggarakan bursa berjangka, juga merupakan salah satu solusi meningkatkan kontrak berjangka multi-



lateral hingga 30 %. Tetapi subjek komoditi yang diperdagangkan itu adalah komoditi yang ada di gudang SRG. Karena semuanya sudah jelas, komoditinya sudah terstandardisasi dan ada fisiknya di gudang,” terang Alex.

Sementara itu, mantan Kepala Bappebti, Ardiansyah Parman, dalam penjelasannya mengatakan, dari berbagai informasi yang pernah kami peroleh, di seluruh dunia nilai transaksi kontrak berjangka multilateral merupakan transaksi terbesar.

“Sedangkan kontrak berjangka produk-produk keuangan dari seluruh dunia hanya sekitar 13 %. Jadi, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan komoditi seharusnya bisa menjadi acuan harga dunia,” katanya.

Sebab itu menurut saya, tambah Ardiansyah, untuk meningkatkan kontrak berjangka multilateral perlu ada pemetaan profil para investor. “Dengan demikian, kita bisa mengetahui kendalanya dan solusinya. Sehingga, kontrak berjangka multilateral ini bisa jalan. Dan, cita-cita berdirinya bursa berjangka seperti diamanatkan undang-undang bisa tercapai,” tegas Ardiansyah.

“Maka saya mengusulkan, agar masing-masing pihak yang ada dipertemuan ini untuk mengambil bagian menghidupkan kontrak berjangka multilateral. Waktu kita sangat terbatas, tidak lama lagi kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kalau tidak kita benahi industri ini, nantinya yang akan bermain itu yang datang dari luar negeri,” katanya.

“

Menjaga integritas industri ini bisa dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, peran itu bisa bursa dan pelaku pasar lainnya. Sehingga PR (pekerjaan rumah) Bappebti hanya melakukan pengawasan dan pengaturan

”

Desk Commodity

Senada dengan Ardiansyah Parman, mantan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, juga mengatakan, salah satu kunci keberhasilan industri perdagangan berjangka komoditi adalah memperbaiki citra buruk yang sudah terlanjur melekat di masyarakat.

“Masyarakat belum memahami betul apa manfaat bursa berjangka, tetapi masyarakat sudah terlanjur memiliki image buruk yang disebabkan beberapa masalah di masa lampau,” terang Deddy.

Lebih jauh ditambahkan Deddy, “saya pikir kita semua yang ada dipertemuan ini memiliki peran dan kepentingan yang sama untuk menjaga integritas bursa berjangka.”

“Menjaga integritas industri ini bisa dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, peran itu bisa bursa dan pelaku pasar lainnya. Sehingga PR (pekerjaan rumah) Bappebti hanya melakukan pengawasan dan pengaturan,” ujar Deddy Saleh.

Di bagian pamungkas pertemuan itu, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, juga mengatakan, langkah meningkatkan kontrak berjangka multilateral bisa dilakukan dengan mengaktifkan *desk commodity* di masing-masing perusahaan pialang berjangka.

“Peraturan Bappebti telah mewajibkan dibentuknya *desk commodity* di masing-masing perusahaan pialang, sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini belum berdampak signifikan meningkatkan kontrak multilateral, disebabkan keterbatasan SDM yang profesional di bidang itu,” terang Syahrul.

Terkait itu, Syahrul menambahkan, bursa berjangka harus berperan aktif untuk mengedukasi SDM perusahaan pialang berjangka. “Di sisi lain, bursa juga harus berinovasi menciptakan kontrak berjangka yang diminati investor,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya. ▲

Catatan Wamendag

Merangkum seluruh diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, Wamendag, Bayu Krisnamurthi, mencatat beberapa poin penting yang menjadi perhatian insan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Catatan Wamendag itu, selain upaya meningkatkan kontrak berjangka multilateral 30 %, juga meletakkan industri perdagangan berjangka sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Berikut ini catatan Wamendag;

1. Presespsi masing-masing pihak harus disamakan terhadap minimum 30 % total volume kontrak berjangka multilateral.
2. Faktor penunjang seperti masuknya BUMN, eksportir terdaftar dan importir terdaftar, ke bursa berjangka harus disuarakan di berbagai forum lintas sektoral.
3. Perlu banyak variasi kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka.
4. Kontrak berjangka mata uang asing dan rupiah sangat realistis diperdagangkan bursa berjangka.
5. Insentif perdagangan kontrak multilateral dan pungutan pajak perlu didiskusikan dengan instansi terkait.
6. Protret investor industri perdagangan berjangka perlu dipetakan.
7. Standardisasi layanan sangat penting karena bursa merupakan bisnis jasa yang mengutamakan kepercayaan investor.



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie

Semangat Revitalisasi Agar PLKA Tak Mati Suri

Sampai tahun 2014 ditargetkan sebanyak 13 PLKA sudah direvitalisasi, syaratnya ada komitmen Pemda.

Sebagus apa pun kebijakan Pemerintah Pusat, tentunya akan sia-sia tanpa dukungan dan peran dari Pemerintah Daerah. Hal itu pun berlaku dengan program pasar lelang komoditi agro (PLKA) yang telah diluncurkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sejak tahun 2003 lalu.

Harus diakui, kinerja PLKA masih belum berjalan dengan optimal. Bahkan, menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Kemendag, Ismadjaja Toengkagie, kinerja PLKA tampak semakin mengalami penurunan. Baik itu berdasarkan frekuensi pelaksanaan lelang, ragam atau jenis komoditas yang dilelang, atau pun dari total transaksi dan jumlah peserta lelang.

“Perlu komitmen Pemda untuk mengembangkan pasar lelang, karena Bappebti selaku pembina dan pengawas pasar lelang hanya memfasilitasi. Sedangkan benefitnya ada di daerah bersangkutan dengan terdistribusikannya komoditi unggulan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ismadjaja Toengkagie dalam wawancara khusus dengan **Buletin Berjangka** di Jakarta, baru-baru ini.

Sebagai catatan, menurut Ismadjaja, realisasi volume transaksi PLKA tahun 2012 hanya mencapai sekitar Rp 800 miliar. Padahal, beberapa tahun sebelumnya realisasi volume transaksi PLKA bisa menembus angka Rp 1 triliun.

“Tahun 2009, realisasi volume transaksi PLKA mencapai Rp 1,8 triliun,

tahun 2010 mencapai Rp 1,6 triliun, dan di tahun 2011 sekitar Rp 1,1 triliun,” paparnya.

Dari segi jumlah, tahun 2012 lalu, jumlah PLKA yang tersisa hanya tinggal 15 pasar lelang. Padahal, sejak tahun 2003 hingga tahun 2010 lalu, terdapat sebanyak 21 pasar lelang. Bagaimana dengan tahun 2013? Ismadjaja menuturkan, telah diputuskan untuk menghentikan penyelenggaraan 2 pasar lelang yaitu PLKA DKI Jakarta dan PLKA Riau.

Bukan tanpa sebab, kata Ismadjaja, penutupan dua PLKA tersebut dinilai kurang berkembang, baik dari segi volume transaksi maupun rendahnya frekuensi penyelenggaraan pasar lelang. Selain itu, komoditi yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan pasar lelang tersebut, juga tidak mencerminkan ko-

moditi unggulan daerah yang bersangkutan.

Jadi, kata Ismadjaja, pada tahun anggaran 2013, pelaksanaan pasar lelang yang dibiayai Dana Dekonsentrasi hanya akan dilakukan di 13 daerah. “Karena itu, untuk tahun 2013 ini saya akan lebih fokus membina dan mengawasi PLKA yang tersisa di 13 daerah,” jelas Ismadjaja.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kinerja PLKA, Ismadjaja mengatakan, Bappebti akan selalu melakukan evaluasi transaksi pasar lelang di semua daerah. “Jika transaksinya semakin menurun, kami akan tutup, dan anggarannya kami akan alihkan kepada daerah yang benar-benar mau fokus untuk melaksanakan ini.”

Untuk itu, Bappebti akan meminta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pasar lelang. “Kalau Pemda tersebut tidak punya komitmen, dengan tegas kami akan tutup pasar lelang tersebut,” tegas Ismadjaja.

Dan, Bappebti direncanakan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pertemuan teknis pasar lelang. Salah

satu agendanya yaitu untuk meminta ketegasan komitmen dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Revitalisasi

Hingga tahun 2014, Bappebti menargetkan sebanyak 13 pasar lelang sudah dapat direvitalisasi. Hal itu bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pasar lelang yang mandiri dan profesional. Sejauh ini, sudah ada sebanyak lima daerah yang masuk program revitalisasi pasar lelang. Yakni, pasar lelang Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan.

“Kami tidak bisa tinggal diam, kalau dibiarkan pasar lelang itu akan mati suri,” ungkap Ismadjaja

Selain itu, menurut Ismadjaja, upaya revitalisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume transaksi PLKA yang kian merosot dari tahun ke tahun. Selama ini, pelaksanaan PLKA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) daerah setempat. Sehingga keterbatasan SDM dari Disperindag tersebut, membuat PLKA tidak dapat berjalan optimal.

“Tugas rutin mereka saja sudah ban-

yak sekali, apalagi ditambah mengelola PLKA. Jelas ini *impossible*,” katanya.

Nah, dengan revitalisasi PLKA, maka penyelenggaraan pasar lelang akan diserahkan kepada pihak swasta yang profesional agar dapat lebih bermanfaat dan berfungsi maksimal. “Bisa saja dari kalangan swasta, koperasi atau pun badan usaha milik daerah,” katanya.

Dalam upaya revitalisasi tersebut, Bappebti akan merubah manajemen dan pola transaksi pasar lelang. Selain itu, Bappebti juga akan mengarahkan PLKA dengan mentransaksikan komoditi unggulan daerah.

“Misalnya seperti di Jambi dengan komoditi karet-nya, Medan dengan komoditi kopi-nya. Jadi, kalau pun ada produk-produk lain seperti komoditi *home industry*, hanya sebagai pelengkap saja,” terang Ismadjaja.

Dengan menawarkan komoditas unggulan daerah dalam pasar lelang, maka akan terjadi perdagangan antara daerah atau antar pulau. “Jadi tidak seperti sekarang ini, setiap penyelenggaraan pasar lelang semua komoditi ditawarkan,” pungkas Ismadjaja. ▲

PERKEMBANGAN TRANSAKSI PASAR LEANG FORWARD KOMODITI AGRO TAHUN 2012

No	Penyelenggara	Nilai Transaksi	Pembeli	Penjual
1	Surabaya, Jatim	Rp 184.530.380.000	109	303
2	Semarang, Jateng	98.798.400.000	21	59
3	Manado, Sulut	121.258.637.500	11	20
4	Bandung, Jabar	101.603.725.000	7	12
5	DI.Yogyakarta	118.539.950.000	10	35
6	Kendari, Sulteng	14.646.400.000	3	13
7	Padang, Sumbar	10.782.141.000	28	305
8	NTB	36.106.841.000	8	33
9	Jambi	16.018.180.000	9	38
10	Lampung	21.931.750.000	9	18
11	Gorontalo	9.600.000.000	5	13
12	DKI Jakarta	10.450.000.000	7	8
13	Makassar, Sulsel	27.125.875.000	10	14
14	Riau	4.474.430.000	3	13
15	Bali	28.287.250.000	10	16
Total		Rp 804.153.959.500	250	900

Semester II 2013

Wonogiri Targetkan Gudang SRG Beroperasi



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, menerima cindramata dari Ketua DPRD Kab. Wonogiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, di tahun 2013 menjadikan sistem resi gudang (SRG) sebagai salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi. Berdirinya Hadirnya gudang SRG yang terletak di Kec. Selogiri, itu, diharapkan mampu mengatasi permasalahan klasik petani setempat dalam memperoleh pembiayaan alternatif pada pasca panen. Gudang SRG Wonogiri dibangun pemerintah pusat dengan dana sebesar Rp 5,2 miliar yang berasal dari APBN 2010.

“Gudang SRG di Wonogiri itu sudah satu tahun lebih belum difungsikan sejak selesai dibangun. Hal itu dikarenakan kami harus mempersiapkan diri seperti mendidik SDM dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya,” demikian antara lain diutarakan Kepala Disperindagkop dan UMKM, Sumardjono, usai melakukan kunjungan kerja di Bappebti, Jakarta, Selasa (19 Februari 2013). Dalam

kunjungan jajaran Disperindag dan UMKM Wonogiri, itu, juga diikuti Ketua DPRD Wonogiri dan sejumlah Anggota Komisi B DPRD Wonogori.

Lebih jauh diutarakan Sumardjono, instrumen SRG diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif mengatasi permasalahan petani di Wonogiri. Sebab, ketika pasca panen harga komoditi cenderung rendah sehingga petani kesulitan untuk memulai masa tanam berikutnya.

“Karena itu, dalam kesempatan kunjungan ini kami bersama Anggota DPRD Wonogiri menyampaikan laporan dan progres gudang SRG kepada Bappebti. Pertama, kami sudah melakukan MoU dengan PT Pertani yang nantinya sebagai pengelola gudang. Kedua, kami dari jajaran Pemda dan DPRD Wonogiri saling mendukung. Hal itu ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta yang bersumber dari APBD Wonogiri,” jelas Sumardjono.

SRG Kedelai

Di sisi lain dikatakan Sumardjono, kerjasama dengan PT Pertani diharapkan bisa segera direalisasikan sehingga dalam waktu dekat gudang SRG Wonogiri bisa dioperasikan.

“Kami sangat berharap gudang ini bisa segera dioperasikan, setidaknya semester pertama tahun ini. Karena selain komoditi gabah, komoditi kedelai juga berpotensi untuk diresigudangkan di Wonogiri. Tetapi ketentuan dari Kementerian Perdagangan belum memungkinkan untuk komoditi kedelai karena belum diatur. Hal itu juga yang kami usulkan tadi kepada Bappebti,” jelas Sumardjono.

Sebagai gambaran, produksi kedelai Wonogiri pada tahun 2012 berkisar 22.000 ton. Produksi kedelai itu dihasilkan dari luas lahan sebesar 6.000 hektar di 21 kecamatan.

Sementara itu, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, Pemda Wonogiri termasuk daerah yang berambisi mengimplementasikan SRG. Hal itu terlihat dari fasilitas pendukung gudang SRG yang disediakan pemda.

“Sepanjang ini, dari 88 gudang SRG yang dibangun pemerintah pusat, hanya Pemda Wonogiri yang satu-satunya menyediakan sarana transportasi. Kebijakan pemda itu sangat mendukung implementasi SRG di daerah,” jelas Ismadjaja.

Dengan adanya sarana transportasi itu, tambah Ismadjaja Toengkagie, petani akan diringankan biaya transportasi. “Sehingga, komoditi yang letaknya jauh dari posisi gudang SRG dapat dimasukkan dalam skema SRG dengan biaya murah,” imbuh Ismadjaja Toengkagie.



Agenda Foto



*Bappebti menyelenggarakan Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan profesionalisme SDM WPB. Peserta yang ikut dalam acara tersebut berjumlah 176 WPB yang berasal dari 40 Perusahaan Pialang Berjangka di seluruh Indonesia yang menjadi Anggota BBJ dan BKDI. Pembicara dalam kegiatan Penataan dan Penyegaran itu berasal dari Pejabat Eselon II Bappebti, BBJ, BKDI, KBI, ISI dan BAKTI. **Bali, 27 Februari 2013.***



*Implementasi SK No. 102/Bappebti/Per/01/2013, tentang ujian profesi wakil pialang berjangka, yang mewajibkan WPB minimum 3 tahun memiliki izin harus di uji ulang. Ujian profesi WPB tersebut diikuti sebanyak 176 WPB yang berasal dari 40 Perusahaan Pialang Berjangka di seluruh Indonesia. **Bali, 28 Februari 2013.***



Bappebti menyelenggarakan kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Bappebti kepada para pelaku usaha dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi guna menghasilkan SDM calon wakil pialang berjangka yang profesional dan handal. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappebti, Nizarli dan peserta yang mengikuti ujian berjumlah 102 orang yang berasal dari berbagai kota di tanah air antara lain: Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan beberapa Kota lainnya. **Surabaya, 8-9 Februari 2013.**



Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir mewakili Kepala Bappebti memberikan arahan sekaligus membuka acara Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pertemuan teknis tersebut dihadiri sebanyak 40 orang peserta yang merupakan Kepala Cabang, Wakil Pialang atau Pegawai Pialang Berjangka yang berada di Medan dan sekitarnya. **Medan, 7-8 Februari 2013.**

Gudang PT Pos Indonesia Tidak Ekonomis Untuk SRG



PT. Pos Indonesia (Persero) yang semula merencanakan di awal tahun 2013 akan menjadi pengelola gudang SRG (Sistem Resi Gudang), sepertinya akan sulit terwujud. Pasaunya, menurut Kepala Biro

Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, gudang milik Pos Indonesia tidak memenuhi standar gudang SRG.

“Gudang mereka itu kecil-kecil, sehingga tidak ekonomis digunakan sebagai gudang SRG. Tetapi dari pembicaraan tampak minat Pos Indonesia sebagai pengelola gudang masih tinggi, yakni dengan menyewa gudang yang ada di berbagai daerah,” jelas Ismadjaja dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Tapi, Ismadjaja menambahkan, dengan menyewa gudang pun akan membuat Pos Indonesia tidak ekonomis. “Karena mereka akan mengeluarkan biaya sewa gudang ditambah biaya operasional pengelolaan gudang SRG-nya.”

Kendati demikian, Bappebti masih akan menunggu langkah yang akan diambil oleh Pos Indonesia. “Mungkin

akan ada pertemuan lagi dengan mereka, tapi sampai sekarang memang belum ada tindak lanjutnya. Mereka masih berhitung,” kata Ismadjaja.

Sebagai informasi, Pos Indonesia pada 29 Agustus 2012 lalu, secara resmi telah melakukan nota kesepahaman kerjasama terkait SRG dan pasar lelang dengan Bappebti. Kemudian, Pos Indonesia juga telah menggelar pelatihan teknis calon pengelola gudang SRG, di Bogor, pada 19-22 November 2012 lalu. Saat itu, Head Change Office Management PT Pos Indonesia (Persero), Amrizal, mengatakan, Pos Indonesia rencananya akan mengelola 4 gudang SRG yang tersebar di Subang, Ciamis, Cianjur, dan Indramayu pada awal 2013. ▲

LPRG Mandek di Kemenkeu

Pembentukan badan usaha pelaksana penjaminan sistem resi gudang masih mandek di meja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ihwalnya, Kemkeu ngotot badan pelaksana pejamin harus ditentukan melalui proses lelang. Namun, dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) badan usaha Lembaga Penjamin Resi Gudang (LPRG) yang disusun Bappebti menetapkan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai penjamin. Imbasnya, penyelesaian dari beleid teknis Undang-Undang (UU) No. 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang, terkatung-katung hingga saat ini.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, draf PP LPRG sudah masuk tahap finalisasi. “Tinggal menunggu masukan dari Kemenkeu baru setelah itu diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara,” ujarnya.

Berdasarkan UU No. 9/2011, me-

ngamanatkan pembentukan LPRG dan lembaga itu berfungsi melindungi hak pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan jika terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan kebangkrutan pengelola gudang.

Menurut Alfons, penunjukan PT KBI sebagai LPRG bukan tanpa alasan. Untuk menjalankan tugas ini, perlu keahlian khusus dan rela berkorban tanpa memikirkan keuntungan yang besar. Sehingga, bila ditentukan lewat tender, boleh jadi perusahaan yang tertarik ikut lelang tak banyak.

Meski begitu, Bappebti tidak keberatan atas keinginan Kemenkeu agar pemilihan badan penjamin resi gudang melalui tahap seleksi, bukan penetapan. Asalkan, kata Alfons, prosesnya dijalankan selektif bisa lewat *beauty contest*.

Makanya, cepat atau lambat, penyelesaian PP LPRG tergantung Kemenkeu yang memutuskan. “Kalau masalah ini

sudah putus, April nanti PP-nya bisa keluar,” imbuh Alfons Samosir. ▲



Kemendag Tetapkan Komoditi Garam Subjek SRG



Kementerian Perdagangan tepatnya 11 Februari 2013 lalu, menerbitkan kebijakan terbaru di bidang Sistem Resi Gudang (SRG). Seperti diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2011, tentang perubahan Undang-undang No. 9 Tahun 2006, tentang sistem resi gudang, Menteri Perdagangan berwenang mene-

tapkan komoditi yang masuk dalam skema SRG.

Kebijakan Kemendag di bidang SRG itu menetapkan komoditi garam sebagai jaminan SRG. Kebijakan itu tertuang dalam Permendag No. 08/M-Dag/Per/02/2013, tentang perubahan Permendag No. 37/M-Dag/Per/11/2011, tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG.

Masuknya komoditi garam dalam skemas SRG mendambah daftar panjang komoditi yang dapat dijamin untuk memperoleh pembiayaan alternatif dari lembaga keuangan. Masing-masing komoditi yang sudah ditetapkan Kemendag yakni komoditi gabah, beras, jagung, kakao, kopi, lada, karet, rumput laut, rotan dan terakhir komoditi garam.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bap-
pebti, Ismadjaja Toengkagie, sebelum

kebijakan itu diterbitkan mengungkap-
kan, proses SRG garam hanya tinggal
menunggu penetapan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag).

“Jika Permendag sudah terbit maka SRG garam sudah dapat diimplementasikan. Terlebih lagi, PT Garam (Persero) selaku calon pengelola gudang dan petani garam sudah sangat menantikan kehadiran SRG garam.”

Pasalnya, PT Garam kekurangan likuiditas untuk membeli garam petani. Di sisi lain, harga garam konsumsi di tingkat petani masih jauh dari harga pembelian pemerintah sebesar Rp 750 per kg. Sedangkan di tingkat petani harga garam hanya berkisar Rp 200 per kg.

Ismadjaja menambahkan, SRG garam rencananya akan diimplementasikan di tiga kabupaten di Madura, yakni di Kab. Sampang, Pamekasan dan Sumenep. ▲

2013 Valbury Targetkan Pertumbuhan 40 %

PT. Valbury sepanjang tahun 2012 lalu mengelola dana masyarakat sebesar US\$ 38 miliar.

Dan pada tahun 2013 ditargetkan bertumbuh hingga 40 % dari tahun sebelumnya. Target pertumbuhan itu optimis diraih dengan bergabungnya PT Platon Niaga Berjangka dan PT Megahtama Berjangka di bawah bendera PT Valbury pada tahun 2012 lalu.

“Dengan spesifikasi dari masing-masing perusahaan pialang berjangka di Valbury Grup itu kami cukup yakni bisa bertumbuh hingga 40 % di tahun 2013 ini,” jelas Presidir PT Valbury, Johannes Soetikno, usai pengudian hadiah bagi investor yang berada di PT Valbury Grup, di Jakarta.

Lebih jauh dijelaskan Johannes, dua perusahaan pialang berjangka yang bergabung dengan Valbury diarahkan pada segmen berbeda. “PT Platon Niaga Berjangka kita setting untuk segementasi investor berbasis teknologi.”



“Jadi, investornya sendiri yang akan online trading pada produk-produk spesifik seperti kontrak mini,” kata Johannes.

Sedangkan PT Megahtama Berjangka akan memperkuat basis PT Valbury Asia Futures dengan segmentasi produk kontrak berjangka forex dan

indeks, tambahnya.

Menurut Johannes, pada tahun 2012 lalu Valubry mengelola dana masyarakat dari sebanyak 36.000 investor, dan sekitar 20 % merupakan investor asing.

“Investor di pasar perdagangan berjangka komoditi mencapai sebanyak 18.000,” imbuh Johannes Soetikno. ▲

Produksi Kopi Indonesia Tertinggal dari Vietnam



Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga produsen kopi terbesar di dunia, di bawah Brasil dan Vietnam. Dari sisi volume, produksi kopi In-

donesia mulai tertinggal dari Vietnam sejak 2006. Berdasarkan data Food Agriculture Organization (FAO) 2012, satu hektare kebun kopi di Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 500 kg kopi. Sedangkan Vietnam mampu menghasilkan 2 ton kopi per hektare.

Selain dihadapkan pada masalah produktivitas lahan yang rendah, pengolahan pasca panen yang kurang baik membuat kualitas kopi Indonesia lebih rendah dari Vietnam. Dengan begitu, Indonesia lebih sulit memasarkan hasil produksi ke pasar internasional, meski kopi Indonesia telah dihargai murah.

Dirjen Perkebunan Kementan, Gamal Nasser, mengatakan, saat ini Indonesia

memiliki areal lahan kopi seluas 1,2 hektare. Dengan seluas itu, jumlah produksi kopi Indonesia pada 2012 sebesar 638 ribu ton dengan rata-rata produksi 700-800 kg per hektare.

Pemerintah mengakui produktivitas tanam kopi kurang optimal, karena dari luasan kebun didominasi tanaman tua atau tanaman rusak serta adanya gangguan hama. "Namun yang mesti dicatat, meski ada kendala tetapi hal itu tidak mengganggu pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini tingkat konsumsi kopi dalam negeri telah mencapai 1-2 kg per kapita per tahun," kata Gamal Nasser. ▲

2013 Lampung Target Meningkatkan Produksi Lada

Lampung yang dahulu terkenal dengan sentra komoditi lada hitam, faktanya saat ini tidak lagi terkenal. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Sutono mengatakan, produksi lada Lampung tidak lebih dari 30 ribu ton per tahun. Padahal, di era tahun 1980-an, produksi lada Lampung mencapai lebih dari 70 ribu ton per tahun.

"Sekarang produksi lada Lampung menurun tajam. Kami ingin mengembalikan kejayaan lada Lampung," ujar Sutono, baru-baru ini.

Lebih jauh dikatakan, areal lada pada

tahun 2012 seluas 73.753 ha. Dari luasan itu, mampu memproduksi lada sebanyak 29.071 ton per tahun. Sementara target pada tahun 2013 areal lada meningkat menjadi 76.509 ha.

Menurut Sutono, dengan luas areal itu ditargetkan memproduksi 30.198 ton per tahun. Sutono menerangkan, jumlah produksi per hektare kurang dari 500 kg. Dengan jumlah itu, lanjutnya, para petani lada tidak mendapat keuntungan. Keuntungan baru bisa didapatkan jika produksi dalam satu hektare mencapai satu ton.

Sutono menambahkan, adanya penurunan produksi ini dikarenakan beberapa

sebab seperti terserang penyakit, pemupukan yang kurang dan pemeliharaan yang tidak baik. ▲



BK Genjot Hilirisasi CPO



Kementerian Pertanian menilai naiknya harga bawang dewasa ini masih wajar. Dirjen Hortikultura Kementan, Hasanuddin Ibrahim, mengatakan, sejak tiga hingga lima tahun belakangan, harga bawang merah memang fluktuatif tergantung musim.

"Triwulan pertama setiap tahunnya, harga bawang merah akan mengalami kenaikan. Penyebabnya, petani cenderung tidak menanam bawang saat musim hujan untuk menghindari risiko serangan hama atau tanaman menjadi busuk akibat intensitas hujan. Namun, harga bawang akan turun kembali saat memasuki musim kemarau atau pada triwulan kedua karena petani banyak menanam di musim ini," kata Ibrahim.

Sebab itu, Ibrahim meminta masyarakat tidak panik saat harga bawang merah dan cabai naik sepanjang pergerakan harga belum mencapai 50 %.

Meskipun begitu, pemerintah tetap

melakukan sejumlah langkah untuk menghindari penurunan produksi bawang merah. "Kami menjaga bagaimana caranya supaya di musim hujan produktivitas dan luas panen bawang merah tidak turun," ujarnya. Beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya, melalui shading net, penguatan akar tanaman, dan perbaikan drainase.

Hasanuddin menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, produksi bawang merah nasional tidak pernah jauh dari angka 900 ribu ton. Dalam satu tahun, kenaikan produksi hanya 1-2 %. Begitu pun dengan luas tanaman bawang merah yang hanya 100 ribu hektare, dengan produktivitas 10-12 ton per hektare. ▲



Rubber Regional Exchange is optimized for implementing in 2013

International Tripartite Rubber Council (ITRC) that consists of 3 world major rubber producers which are Thailand, Indonesia and Malaysia will soon start the discussion on a plan to establish Rubber Regional Exchange.

With the presence of Rubber Regional Exchange, ITRC hoped that they can have more control on world rubber supply and need. Moreover, the monitoring on rubber export realization for each country

can be done transparently.

Coftra Chief, Syahrul R Sempurnajaya, stated that he is optimist at the end of 2013 regional rubber exchange can be implemented although until now the plan for this regional exchange is still on process. "We are hoping that at the end of this year the plan can be implemented." The meeting of those 3 countries is planned to be happened in Thailand on February 2013.

"Technical team will meet this February to similes the perception," Syagrul ex-

plained.

Furthermore Syahrul said that the implementation of rubber trading technically will be done by rubber producer country with they own quality standard. But the implementation will be done on line at the same time.

"This far, from the country member of ITRC, Indonesia and Malaysia is the most ready countries to implement the policy. Thailand is still considering physical seller market," Syahrul R Sempurnajaya said. ▲

FBAG regulates Futures Brokers

The legalization of mini account or mini contract service in Indonesia, according to Coftra Chief, Syahrul R. Sampurnajaya has 2 important purposes. First, mini contract is using online electronic system so in doing mini contract transaction we do not need marketing person as mediator.

"It means that investor is the one who will do sell – buy process. Therefore an investor needs to understand and master the contract that was offered by brokerage firm," He said.

As marketing person is not needed therefore the transaction is done online. It will be more effective and transparent. All this time they are so many problems

on bilateral trading that were caused by ambition of marketing team who take any way and cross the futures trading, Syahrul explained.

Secondly, mini account can be a saver and legal infrastructure for the investors. "All this time foreign brokerage that has no license and has no clear legality was received lost demand from the community whereas they will not responsible for any problem. That's the reason why we made the same infrastructure domestically," Syahrul explained.

Now days, Syahrul added that mini contract service is still on experiment level with pilot project for 6 months to 1 year ahead. "If the brokerage firm that offers it cannot show their integrity, we will evalu-

ate it and if it's needed we will withdraw their mini account permission."

"Actually the mini account has been once established but it was not using on-line system so the type is like lottery. Well at that time Coftra withdrawn the license of that mini account or mini lot." He said.

Therefore, Syahrul said that the scheme of Alternate Trading System towards the contracts with mini size of lot (mini contract) that is launched is different with the previous service.

"The difference is on its on-line electronic system and this mini contract is not impacting multilateral contract," Syahrul R. Sampurnajaya emphasized. ▲

2013, year of BKDI Restoration

Indonesian Derivative and Commodity Exchange (BKDI) in 2013 will focus and support Coftra's policy that established minimum transaction of multilateral contract for 30%. That thing was disclosed by BKDI President, Megain Widjaja, to Futures Bulletin, from his office last January.

Although Megain acknowledged "the minimum target of 30% multilateral transaction volume is not the thing that can easily achieved by futures broker companies. But we also support Coftra to increase transaction volume of futures broker companies."

What are the steps that will be done by

BKDI? Megain said, starting to dig deeper the market potency from some futures contract that was traded in this exchange.

BKDI, Megain continued, will be more focus to dig the potency of commodity futures contract that has been traded in BKDI. "Actually BKDI is already has many commodity futures contract but they have not been maximized trading by futures brokerage firm."

On another side, Megain said, BKDI will educate and do socialization for the market participants, especially for the futures brokerage firm to be more active to offer commodity futures contract to community.

"We will continually monitor desk commodity in futures brokerage firm of BKDI member and all futures member will be re trained," Megain explained.

Moreover, Megain added, we will make another visit to each commodity participants so they will be interested to do transaction in BKDI. "So all commodity participants also need to be maintained and we honestly said that this never be done in the past 2012."

2013 for BKDI is a restoration year. "To achieve the restoration, we cannot walk ourselves. We will need support from all related parties," Megain Widjaja concluded. ▲

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN JANUARI 2013

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	RG Diagunkan	Nilai Pembiayaan (Rp)	Bank/LKNB
1	PT. PERTANI						
	- Gudang Pasaman Barat	Jagung	3	144.455.800	3	101.037.000	BRI
	- Gudang Jepara	Gabah	1	41.340.000	1	28.000.000	Bank JATENG
2	PT BHANDA GHARA REKSA						
	- Gunung Lintong - Deli Serdang	Kopi	1	645.000.000	-	-	-
JUMLAH		Gabah	1	41.340.000	1	28.000.000	
		Jagung	3	144.455.800	3	101.037.000	
		Kopi	1	645.000.000	-	-	
TOTAL			5	830.795.800	4	129.037.000	



Pada bulan Januari 2013, terdapat 4 resi yang diberikan pembiayaan oleh Bank BRI cabang Pasaman Barat dan Bank Jateng cabang Jepara dengan total nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 129.037.000. Sedangkan 1 resi yang diterbitkan di Kab. Deli Serdang belum dimanfaatkan pemiliknya (PT Gunung Lintong) untuk memperoleh pembiayaan karena Kab. Deli Serdang baru saja mengimplementasikan Resi Gudang pada Januari 2013, sehingga lembaga perbankan yang ada di Sumatera Utara masih dalam penyiapan implementasi Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE). Direncanakan pada awal Februari 2013 pembiayaan sudah dapat dilakukan.

Seperti tampak pada Tabel Pembiayaan Resi Gudang Bulan Januari 2013, pada bulan Januari total pembiayaan yang

diberikan oleh lembaga keuangan (Bank BRI dan Bank Jateng) adalah sebesar Rp. 129.037.000 yang diberikan melalui Skema Subsidi Resi Gudang kepada Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi.

Resi Gudang dalam SRG memiliki masa aktif rata-rata kurang lebih 4 bulan. Oleh karena itu, dengan adanya penerbitan Resi Gudang pada masa akhir tahun 2012 di daerah Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Mojokerto, Jombang, Cianjur, Ngawi, Sumedang, Ciamis, Lombok Barat, Tuban, Barito Kuala maka pada periode Januari 2013 masih terdapat 108 resi gudang aktif (barang masih disimpan di gudang SRG) untuk komoditi Gabah, Beras, Jagung dan Kopi dengan total volume sebesar 4.128,3 ton. ▲



**KETERSEDIAAN STOK KOMODITI DALAM GUDANG SRG
BULAN JANUARI 2013**

NO	DAERAH / GUDANG	VOLUME KOMODITI (TON)			
		GABAH	BERAS	JAGUNG	KOPI
1	Kab. Indramayu				
	- Haurgeulis (Pertani)	535,6			
	- Losarang (Pemkab)	115			
2	Kab. Banyuwangi				
	- Muncar (Pertani)	104			
3	Kab. Sidrap				
	- Sereang (Pertani)	112,98	237,75		
4	Kab. Pinrang				
	- Watang Sawito (Pertani)	372,33			
5	Kab. Mojokerto				
	- Ngoro (Pertani)	336			
6	Kab. Jepara				
	- Pecangaan (Pemkab)	7,95			
7	Kab. Jombang				
	- Mojoagung (Pertani)	445			
8	Kab. Cianjur				
	- Warungkondang (Pemkab)	700,25			
9	Kab. Sumedang				
	- Tomo (Pemkab)	25			
10	Kab. Ciamis				
	- Cisolontrol (Pertani)	120			
11	Kab. Lombok Barat				
	- Kediri (Pertani)	405,2			
12	Kab. Lebak				
	- Cibadak (Pemkab)	120			
13	Kab. Pasaman Barat				
	- Pasaman (Pemkab)			42,49	
14	Kab. Barito Kuala				
	- Mandastana (Pemkab)	405,77			
15	Kab. Deli Serdang				
	- Tanjung Morawa (Gunung Lintong)				15
TOTAL		3.833,08	237,75	42,49	15



Persiapan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

Pengantar Redaksi: Berdirinya sebuah unit gudang dalam skema sistem resi gudang (SRG) di suatu daerah, itu menandai bahwa pembiayaan SRG baru dimulai. Untuk itu, pasca berdirinya sebuah unit gudang dalam skema SRG, para stakeholder perlu membuat suatu perencanaan yang matang dan terstruktur. Dengan demikian, semua pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan terlaksananya skema pembiayaan SRG.

Berikut ini langkah-langkah mengoperasikan sebuah unit gudang dalam skema Sistem Resi Gudang:

Penyiapan Komoditi dan Gudang Sesuai Standar (SNI)

Sesuai ketentuan baku yang berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2011, komoditi yang masuk dalam skema Sistem Resi Gudang harus memenuhi berstandar Standar Nasional Indonesia- SNI. Demikian juga dengan gudang yang dijadikan sarana pengimanan komoditi, harus memiliki sertifikasi SNI.

■ Standar Mutu Komoditi

Bedasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/02/2013, tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, hingga saat ini ada 10 (sepuluh) komoditi yang dapat diresigudangkan yaitu komoditi Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan dan Garam.

Komoditi ini harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Jumlah minimum komoditi yang

dapat diresigudangkan tergantung pada kebijakan dari pengelola gudang. Misalnya, untuk komoditi jagung, bila dilihat dari kapasitas pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang sekitar 20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

Untuk memperoleh Resi Gudang, setiap komoditi yang akan disimpan di gudang harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan.

Pengujian terhadap mutu komoditi



dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai lembaga yang berkompeten, dalam hal ini Laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. LPK dalam melakukan tugasnya bersipat independen (tidak terikat dengan pihak manapun, baik perusahaan Pengelola Gudang ataupun calon pembelo komoditas). Laboratorium penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk barang.

■ Gudang Berstandar SNI

Sesuai Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 03/BAPpebti/PER-SRG/7/2007, sejumlah persyaratan teknis harus dipenuhi gudang sebagai tempat penyimpanan komoditi yang baik.

Gudang yang dimaksud dalam

Sistem Resi Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum.

Sejumlah persyaratan umum gudang meliputi lokasinya, yang harus memenuhi persyaratan:

- Di dekat atau dipinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC atau akses lain melalui melalui perairan untuk memudahkan keluar masuk area gudang, sehingga menjamin kelancaran bongkar muat dan distribusi.
- Di daerah yang aman dari banjir dan longsor
- Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/bahan kimia.
- Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk disekitarnya.
- Tidak terletak pada tempat bekas pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.

Secara teknis, konstruksi bangunan gudang harus kokoh demi menjaga mutu dan keselamatan manusia. Atapnya dapat dilengkapi atap pencahayaan, yang terbuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak bocor. Dinding bangunannya harus kokoh, lantai terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan beban berat, dengan talang-talang yang menjamin air mengalir lancar, pintunya terbuat dari bahan yang kuat,



dilengkapi kunci yang kuat, berkanopi guna menjamin kelancaran keluar masuk barang. Ventilasinya harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya. Bangunan gudang juga mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.

Disarankan, gudang membujur dari arah Timur ke Barat sehingga sesedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

Gudang harus memiliki fasilitas setidaknya: identitas pengaturan lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar masuk barang; instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang; instalasi hydrant untuk pencegahan kebakaran, serta alat penangkal petir. Gudang juga dilengkapi sarana komunikasi; system keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh disekelilingnya; kamar mandi dan WC; halaman atau area parkir yang memadai; serta fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir jalan akses lain melalui perairan.

Gudang juga harus dilengkapi dengan peralatan alat timbang yang diterasah, palet yang kuat menopang tumpukan barang sehingga mutu barang terjaga, higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang. Tangga staple juga diperlukan untuk memudahkan penumpukan barang di gudang, alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa, kotak P3K, serta alat kebersihan gedung.

BERSAMBUNG



Mengenal Lebih Dalam Analisis Fundamental

Pentingnya perlindungan konsumen, transparansi, kompetisi dan integrasi pasar bentuk inovasi serta perkembangan pasar berjangka.

***) Apriliyanto,**
Pelaksana di Sekretariat, Bappebti

Analisis Fundamental merupakan salah satu tools analisis yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran sehingga menjadi dasar dari pergerakan harga. Dalam analisis fundamental ini, biasanya selalu berkaitan dengan karakteristik komoditi dan faktor-faktor ekonomi.

Peningkatan aktivitas perdagangan bursa berjangka di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan minat pelaku pasar yang sangat besar dalam perdagangan jangka pendek maupun menengah. Semakin meningkatnya pemodal yang melakukan perdagangan baik dalam masa jangka pendek maupun harian, akan mendorong para pemodal tersebut melakukan perdagangan yang berisiko tinggi.

Sebab itu, pelaku pasar membutuhkan suatu metode serta informasi yang memadai, informasi dan instrumen pengelolaan risiko yang responsif dan relevan untuk mengelola risiko pasar secara cepat dan terukur. Di sisi lain, dengan menggunakan analisa fundamental yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan dengan analisa jenis lain, namun analisa ini adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui ke arah mana harga akan bergerak.

Analisa fundamental juga mengajarkan kita untuk melihat segala permasalahan dari sudut pandang yang luas. Selain itu, dapat mempertajam wawasan dan pola pikir ke depan.

Seorang trader diharapkan dapat menjelaskan gejolak pasar tidak hanya berdasarkan sebuah grafik dan chart, tapi juga harus bisa menjelaskan alasan mendasar tentang apa penyebabnya dan bagaimana semua itu bisa terjadi agar tidak memberikan informasi yang menye-

satkan bagi nasabahnya.

Bagi regulator, analisa fundamental setidaknya dapat memiliki gambaran tentang dinamika trading dari sudut pandang fundamental, sehingga lebih memahami dalam membina, mengatur, mengawasi dan membuat aturan terkait pengelolaan risiko dari berbagai sudut pandang.

Dalam kaitan itu, SDM Bappebti pada Oktober 2012 lalu Fundamental Analysis Course yang diselenggarakan oleh London Metal Exchange (LME) di London, Inggris. Seperti diketahui, LME adalah bursa berjangka yang merupakan pusat perdagangan industri logam dunia yang mencapai lebih dari 80 % bisnis non-ferrous metal berjangka.

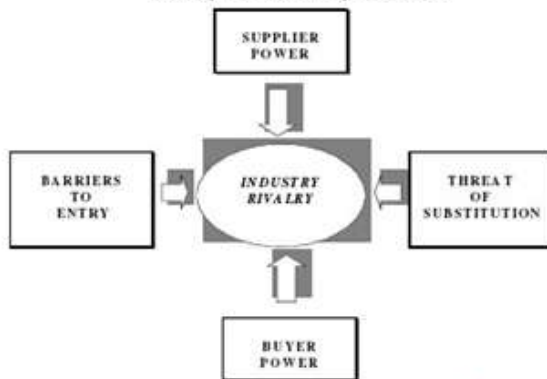
Dalam pelatihan tersebut dibagi menjadi beberapa sesi kegiatan yang mencakup Key Principles of Fundamental Analysis, case studies, Group Exercise and Presentations to the class, the analysts views.

Fundamental Analysis Theory on Commodity

Menelaskan tentang Analisa Fundamental (Fundamental Analysis) yang merupakan salah satu analisis atau metode pendekatan yang menganalisis (atau mengamati) yang mengacu pada indikator-indikator atau faktor-faktor global suatu negara/wilayah, seperti: kondisi perekonomian, kebijakan moneter, kebijakan politik, keadaan geopolitis, dan lain sebagainya. Pengamatan atau analisa fundamental ini bertujuan untuk memahami keadaan ekonomi suatu negara/wilayah tertentu yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memprediksi pergerakan suatu harga komoditi, valas/forex, kontrak berjangka (futures contract), indeks dan beberapa instrumen keuangan

Porter's five forces

According to Porter (Michael E. Porter: *Competitive Strategy*), an industry is influenced by Five Forces



LONDON METAL EXCHANGE

PEST analysis

PEST - Political, Economic, Social & Technological factors of the macro-environment.

POLITICAL ANALYSIS • Trade restrictions and tariffs (arbitrage). • Political stability (Middle East, Nigeria) • Anti-trust laws • Environmental regulations • Employment laws (cheap labour) • Tax policy	ECONOMIC ANALYSIS • Economic growth rate • Exchange rates, inflation rate, interest rates etc • Business cycle stage (prosperity, recession, recovery) • Labour costs • Government intervention in the free market
SOCIAL ANALYSIS • Demographics • Population growth rate • Class structure • Education • Emphasis on environment, safety & health.	TECHNOLOGICAL ANALYSIS • Research & Development Activity • Rate of technological change • Impact of technology on products • Impact on cost structure • Impact on value chain structure

LONDON METAL EXCHANGE

lainnya.

Terdapat beberapa faktor dalam fundamental seperti yang sudah disebutkan di atas. Namun, jika kita himpun semua faktor fundamental yang ada ke dalam suatu kelompok, semuanya akan terkumpul ke dalam empat kategori besar, yakni faktor politik, faktor keuangan, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.

Prinsip Dasar Analisis Fundamental

Ada tiga prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis fundamental, yaitu;

1. Industry Overview, yakni; Bagaimana tren industri dan arah pasar ke depan dan bagaimana mengenali situasi dan kondisi internal dan eksternal dari perkembangan industri
2. Collection of raw data, dengan metode ini kita memahami dan mencari data-data yang dapat dipergunakan dalam memprediksi pergerakan harga ke depan baik itu data perkembangan industri maupun data perkembangan ekonomi.
3. Market modelling; mencakup Supply and demand yaitu di mana jika permintaan lebih besar dari pada penawaran, harga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan lebih kecil dari pada penawaran, harga cenderung akan turun; Modelling historical data yakni bagaimana kita menggunakan data pada periode sebelumnya yang berfungsi sebagai tolak ukur kinerja yang telah dilakukan; Forecasting: Econometric &

Quantitative analysis techniques, yakni data yang berasal dari pengamatan dan penilaian analisis kita gunakan untuk memprediksi kenaikan atau penurunan harga.

Porter Five Forces

Sebelum penulis memasuki studi kasus penggunaan analisis fundamental, ada baiknya terlebih dahulu mengkaji dan mengetahui gambaran sebuah industri pengguna komoditi yang bakal dianalisis. Metode yang digunakan yakni Porter Five Forces. Metode ini menganalisis sebuah industri dengan menggunakan teori yang dikenalkan Michael E Porter dalam bukunya yang berjudul *Competitive Strategi*. menurut Porter, perkembangan sebuah perusahaan atau industri di pengaruhi oleh 5 kekuatan yaitu; masuknya kompetitor-pada bagian ini kita harus mengetahui cara yang mudah untuk berkompetisi dengan kompetitor baru maupun kompetitor yang sudah ada pada industri tersebut.

Ancaman Produk atau jasa pengganti - di sini kita mengetahui cara mudah masuknya produk atau jasa yang dapat menjadi alternatif dari produk atau jasa yang sudah ada, khususnya yang dibuat dengan biaya lebih murah.

Daya tawar dari pembeli - yakni bagaimana kuatnya posisi pembeli. Pembeli mempunyai kekuatan untuk menentukan kemana dia akan melakukan transaksi;

Daya tawar dari supplier - bagaimana kuatnya posisi penjual. Apakah ada banyak supplier atau hanya beberapa supplier saja, bisa jadi mereka memonopoli supply barang;

Persaingan diantara pemain yang sudah ada - bagaimana kuatnya persaingan antara pemain yang sudah ada. Apakah ada pemain yang sangat dominan atau semuanya sama

PEST Analysis

Selanjutnya, seorang pelaku perdagangan berjangka komoditi sebelum melakukan analisis fundamental juga perlu menganalisis PEST. Analisis ini adalah analisis eksternal makro-lingkungan yang mempengaruhi semua perusahaan. PEST merupakan singkatan dari faktor Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi dari eksternal makro-lingkungan. Faktor eksternal seperti biasanya berada di luar kendali perusahaan dan kadang-kadang menampilkan diri sebagai ancaman.

Untuk alasan ini, beberapa orang mengatakan bahwa "hama" adalah istilah yang tepat untuk faktor ini. Namun, perubahan dalam lingkungan eksternal juga menciptakan peluang baru dan huruf kadang-kadang diatur kembali untuk membangun istilah yang lebih optimis analisis PEST. Banyak makro-faktor lingkungan yang spesifik negara dan analisis PEST perlu dilakukan untuk semua negara yang menarik.

Bersambung



Direktur PT.GAF, Wawan Trisnawan

Antusias dan Berambisi Angkat GAF

Sosok yang duduk di pengurusan top manajemen PT GAF ini, memiliki ambisi membawa perusahaannya menjadi pemain global di industri PBK tanah air.

Bagi lelaki kelahiran Semarang 7 Januari 1968 ini, berkiprah di industri perdagangan berjangka komoditi sudah menjadi pilihan. Dan untuk terus berkembang dalam meniti karir, pemilik nama Wawan Trisnawan ini mengaku telah jatuh cinta dengan pekerjaannya. “Untuk dapat berkembang, tentu saja kita harus mencintai,” buka pria yang akrab disapa Wawan ini, saat dijumpai di ruang kerjanya.

Selama 5 tahun Wawan memikul tanggungjawabnya sebagai seorang Direktur PT. Global Artha Futures (GAF). Ijazah SI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta jurusan Manajemen Ekonomi, menjadi bekal Wawan menempati posisi penting dalam bagian top manajemen. Selain itu, Wawan termasuk salah seorang yang memiliki

motivasi tinggi dalam pekerjaannya.

“Prinsipnya, saya harus bekerja dengan sebaik mungkin,” katanya.

Bicara soal GAF, Wawan memiliki antusiasme dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ambisinya, bisa membawa GAF menjadi perusahaan pialang terdepan yang masuk daftar 10 besar pialang teraktif di Indonesia. Dan, Wawan berharap kelak GAF dapat menjadi pemain global di industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) tanah air.

“Untuk itu, GAF akan seoptimal mungkin meningkatkan transaksi kontrak berjangka multilateral pada tahun 2013 ini. Untuk menggenjot kontrak berjangka multilateral, pastinya kita masih butuh dukungan dari bursa- Jakarta Futures Exchange (JFX). Kita akan kirim tim untuk mengikuti



pelatihan mekanisme kontrak multilateral di JFX dan rutin ikuti pelatihan secara intensif seperti yang diselenggarakan Bappebti,” papar anak pertama dari 4 bersaudara ini.

Selain itu, GAF saat ini juga sedang mempersiapkan untuk membangun edukasi center sebagai pelatihan desk komoditi agar dapat lebih mendongkrak transaksi kontrak multilateral. Ke depan, GAF juga berencana akan menjadi market maker untuk beberapa komoditi.

“Kita saat ini masih mengkaji ke arah sana, kebutuhannya ada tetapi kan perlu ada hitung-hitungan secara ekonomis menguntungkan atau tidak bagi korporasi,” jelas suami dari Susanti ini.

Adapun untuk mendorong eksistensi, Wawan mengatakan, GAF akan menciptakan transparansi dan menata tata kelola perusahaan yang lebih baik. Sebagai bukti, GAF telah memiliki kantor sendiri yang terletak AXA Tower Lt. 38, Kuningan City yang resmi beroperasi pada Januari lalu. Sebelumnya, perusahaan pialang ini membuka kantor pusatnya di kawasan Thamrin.

Lebih jauh dikatakan Wawan, di tahun 2013 GAF juga memiliki misi untuk masuk dalam jajaran level menengah perusahaan pialang berjangka anggota JFX. Sebab itu berbagai strategi pun sudah disusun, diantaranya memiliki gedung sendiri dan melengkapi berbagai fasilitas.

“Kantor ini kami anggap sudah sangat representatif. Setiap investor yang datang ke GAF bisa dengan maksimal melakukan trading karena kami sudah siapkan semua fasilitas pendukung. Termasuk fasilitas training dan lounge. Jadi dengan fasilitas itu kami harapkan investor yang datang ke GAF bisa nyaman

bertransaksi dan menggali informasi perdagangan berjangka,” jelas ayah dari seorang putri ini.

Singkat cerita, sejumlah tantangan ke depan akan dihadapi Wawan untuk mengangkat kinerja perusahaan sesuai dengan ambisi yang dipaparkannya.

Nah, di tengah rutinitas dan kesibukan yang tinggi, Wawan mengatakan, ia harus menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya untuk tetap fokus dalam memimpin perusahaan. Caranya? “Di hari kerja, saya tiba di kantor pukul 07.30 WIB. Sambil menunggu waktu kerja, saya melakukan olahraga dan fitness minimal 3 hari dalam seminggu. Kebetulan di sini (gedung PT. GAF) ada sarananya.”

Sementara itu, bicara soal finansial, Wawan mengaku, sudah mendapatkan kenyamanan dengan bekerja di perusahaan itu. “Pastinya sudah memberikan kenyamanan,” ungkap Wawan Trisnawan. ▲

“

Kita saat ini masih mengkaji ke arah sana, kebutuhannya ada tetapi kan perlu ada hitung-hitungan secara ekonomis menguntungkan atau tidak bagi korporasi

”



Manfaat Pasar Lelang Komoditi Agro

